

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang direncanakan dan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2011) pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensi yang melibatkan adanya perubahan - perubahan penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan.

Tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) adalah faktor yang sangat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan di setiap negara, karena sumber daya manusia mempunyai kedudukan sebagai subjek dan objek pembangunan. Salah satu keberhasilan pembangunan sebuah pemerintahan dapat dinilai dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambahnya lapangan pekerjaan akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indradewa dan Natha 2015).

Namun yang menjadi permasalahan, dewasa ini masih banyak negara yang memiliki masalah mengenai ketenagakerjaan, khususnya negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki masalah mengenai ketenagakerjaan tersebut. Masalah yang dimaksud

adalah masalah mengenai tingginya tingkat pengangguran, yang diketahui merupakan masalah yang dapat menghambat proses pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam Sindo News (2016), menyatakan pengangguran merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena angka pengangguran yang tinggi akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta wilayah. Oleh sebab itu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, masalah utama yang harus diperhatikan adalah tingkat pengangguran.

Berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dari bulan Agustus 2014 sebesar 7.244.905 jiwa menjadi 7.560.822 jiwa pada bulan Agustus 2015. Hal tersebut disebabkan karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Fakta yang terjadi yaitu Indonesia lebih banyak menghasilkan pencari kerja dari pada pencipta kerja.

Dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang memiliki permasalahan di bidang ketenagakerjaan, menurut Badan Pusat Statistik (2015) Pulau Jawa adalah pulau yang menjadi urutan pertama se-Indonesia yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Diketahui hampir 60 persen jumlah pengangguran di Indonesia berada di Pulau Jawa. Berikut merupakan tabel keadaan tenaga kerja menurut pulau di Indonesia tahun 2015.

Tabel 1.1
Keadaan Tenaga Kerja Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2015

Pulau	Bekerja (jiwa)	Pengangguran (jiwa)	Angkatan kerja (jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Sumatera	23.913.680	1.674.238	25.587.918	6,54
Jawa	66.035.108	4.523.379	70.558.487	6,41
Kalimantan	7.031.050	408.478	7.439.528	5,49
Sulawesi	7.977.450	484.567	8.462.017	5,73
Papua	2.052.706	102.874	2.155.580	4,77
Indonesia	114.819.199	7.560.822	122.380.021	6,18

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa angkatan kerja dan pengangguran di Indonesia tahun 2015 lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 70.558.487 jiwa angkatan kerja dan 4.523.379 jiwa pengangguran. Selanjutnya juga dapat dilihat meskipun angkatan kerja dan pengangguran di Indonesia tahun 2015 lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi tidak berada di Pulau Jawa melainkan di Pulau Sumatera. Ini berarti permintaan tenaga kerja di Pulau Jawa cukup mampu mengimbangi penawaran tenaga kerja yang ada walaupun tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa juga masih cenderung tinggi.

Melihat tingginya jumlah pengangguran yang terjadi di Pulau Jawa, penulis tertarik untuk melihat lebih lanjut kondisi pengangguran di setiap provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kondisi pengangguran setiap provinsi di Pulau Jawa dilihat melalui tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi yang diterbitkan oleh BPS. Berikut tabel tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2011 – 2015.

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2011-2015

No.	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013	Agustus 2014	Agustus 2015
1.	DKI Jakarta	11.69	9.67	8.63	8.47	7.23
2.	Jawa Barat	9.96	9.08	9.16	8.45	8.72
3.	Jawa Tengah	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99
4.	DI Yogyakarta	4.39	3.90	3.24	3.33	4.07
5.	Jawa Timur	5.38	4.11	4.30	4.19	4.47
6.	Banten	13.74	9.94	9.54	9.07	9.55

Sumber : Badan Statistik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa selama lima tahun yaitu tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, kecuali Provinsi DKI Jakarta yang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Selain itu juga dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Provinsi Banten pada tahun 2011 yakni sebesar 13.74%, sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran, beberapa diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, upah riil, dan pendidikan. Menurut Muslim (2014) pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut karena, dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Namun disisi lain perkembangan selanjutnya ditandai munculnya suatu keraguan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sindo News (2016), hampir seluruh dunia menghadapi situasi dimana pertumbuhan ekonomi ada namun tidak mampu membentuk suatu kesempatan kerja di negara-negara tersebut. Hal ini juga didukung berdasarkan bukti empirik di dalam penelitian Sobita dan Suparta (2014), yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun mempunyai tingkat pengangguran yang juga tinggi. Hal inilah kemudian menimbulkan perdebatan antara kelompok yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang disebut *pro-growth* dan kelompok yang menentang atau yang *anti-growth*.

Selain meningkatkan PDRB, pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan pekerja, yang dijumpai oleh kebijakan pemberlakuan upah minimum. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat pada umumnya akan mendorong naiknya upah. Menurut Mankiw (2006) pengaruh upah terhadap tingkat pengangguran terbuka cukup fatal dan hal ini disebut dengan kekakuan upah. Secara teoritis, tingginya tingkat upah akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Skemanya adalah ketika upah minimum mengalami kenaikan maka banyak orang ingin mendapatkan pekerjaan sehingga penawaran tenaga kerja meningkat. Disisi lain penyediaan lapangan pekerjaan, dalam hal ini perusahaan justru melakukan pengurangan jumlah tenaganya untuk

meringankan biaya operasional perusahaan. Sehingga yang terjadi permintaan terhadap tenaga kerja menurun dan jumlah pengangguran semakin meningkat.

Selanjutnya pasar tenaga kerja menyediakan berbagai macam jenis lapangan pekerjaan. Dengan demikian setiap individu yang ingin masuk dalam pasar tenaga kerja wajib membekali diri dengan keahlian dan keterampilan. Salah satu cara yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pendidikan. Menurut Mankiw (2006), pendidikan termasuk ke dalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia. Teori ini biasa disebut dengan *Human Capital Teori* (teori modal manusia).

Tingkat pendidikan pada umumnya menjadi salah satu tolak ukur perusahaan (pemberi kerja) untuk mengklasifikasikan kemampuan kerja individu dalam dunia kerja (*working capacity*). Melalui pendidikan yang tinggi perusahaan menganggap bahwa wawasan pencari kerja akan semakin meluas, yang secara tidak langsung akan memacu perkembangan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Oleh karena itu seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi yang juga didukung dengan keahlian dan keterampilan, dapat memiliki peluang yang lebih besar masuk ke dalam dunia kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah riil dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka setiap provinsi di Pulau Jawa. Penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2004 – 2015”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015?
- 2) Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) riil terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015?
- 3) Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) riil terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran sehingga dapat dijadikan suatu acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka penanggulangan pengangguran di Pulau Jawa maupun di daerah lainnya.

2) Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang studi pengangguran dan dapat menambah pengalaman dibidang penelitian.

3) Pembaca/peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan kondisi pengangguran terbuka yang terjadi di Pulau Jawa serta dapat dijadikan sebagi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pengangguran di Pulau Jawa maupun di daerah lain.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015.
- 2) Diduga upah minimum provinsi (UMP) riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015.

- 3) Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2004 - 2015.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian dengan urutan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan studi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, model yang digunakan dalam penelitian, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian, dan batasan operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data yang diperoleh dari perhitungan dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pemerintah.